

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Dalam tata pergaulan sosial masyarakat ada sub sistem yang berada di luar tatanan sosial, biasanya sub sistem bisa datang atas nama kelompok atau perorangan. Dalam kegiatannya, mereka mengambil bentuk di luar pakem dari tata kehidupan sosial, seperti, pungutan liar terhadap orang-orang di pasar, mabuk-mabukan, atau bentuk kriminalitas lain yang meresahkan masyarakat. Dengan kata lain kegiatan mereka bebas sesuai dengan keinginan mereka tanpa mengindahkan kaidah atau norma sosial dari masyarakat. Dalam bahasa populer masyarakat sub sistem atau kelompok itu sering diistilahkan dengan kata “preman”.

Banyak kejadian di sekitar masyarakat yang dinilai meresahkan sebagai akibat dari perilaku “preman”. Dalam pemberitaan media massa, dapat dijumpai bagaimana ulah preman ini meresahkan masyarakat. Misalnya, Seorang pedagang babak belur di hajar oleh preman karena menolak memberi setoran, Seorang gadis digagahi oleh sekelompok preman atau preman tewas dihajar massa karena sering melakukan pungli.

Dalam konteks sosiologis, penyebab lahirnya preman, seperti yang dinyatakan oleh Soeryono Soekanto, “bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu dapat dirumuskan adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap dan pola perikelakuan di antara kelompok dalam masyarakat yang selaras ataupun tidak selaras”¹

Ketidakselarasan dari perilaku sebagian dari masyarakat adalah merupakan masalah sosial. Masalah sosial seperti yang dikatakan oleh Soeryono Soekanto adalah “Suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat, yang membahayakan

¹ Soeryono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988. hlm 101

kehidupan kelompok sosial, atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial”.²

Dari pendapat di atas, bahwa masalah sosial merupakan bentuk integrasi yang tidak harmonis antara lembaga kemasyarakatan. Orang atau individu-individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan macam-macam hubungan sosial. Setiap masyarakat mempunyai pola atau aturan yang bersangkutan dengan kesejahteraan, kebendaan, kesehatan fisik, kesehatan mental, serta penyesuaian diri individu atau kelompok sosial. Penyimpangan terhadap pola atau aturan tersebut merupakan gejala abnormal yang merupakan masalah sosial.

Untuk individu yang berusia muda tantangan jauh lebih berat, sempitnya lahan pekerjaan dan tuntutan beban kehidupan perkotaan yang berat menjadikan mereka kehilangan orientasi untuk menentukan pilihan hidup. Untuk mengekspresikan disorientasi tadi, mereka larut dalam bentuk premanisme, seperti pemalakan liar, perkelahian (tawuran), mabuk-mabukan, atau penyalahgunaan narkoba. Dengan melakukan tindakan seperti itu, setidaknya eksistensi dapat dipertahankan ditengah kehidupan masyarakat.

Premanisme, merupakan fenomena masyarakat modern yang lahir sebagai akibat dari terdiferensiasinya kehidupan masyarakat yang mulai beragam dalam berbagai bentuk peran dan status sosial. Ketika masuk dalam suatu peran, dibutuhkan berbagai macam spesifikasi khusus yang didasarkan pada tingkat pendidikan dan keahlian. Kegagalan dalam memasuki peran, karena minimnya pendidikan dan keahlian menjadikan mereka melampiaskan dalam bentuk-bentuk yang abnormal, suatu bentuk tingkah laku yang tidak disukai oleh masyarakat pada umumnya.

Di kota-kota besar, seperti Jakarta, generasi muda yang tidak tertampung dalam tatanan sosial masyarakat menyalurkan kegiatan dalam kehidupan jalanan. Dalam

² Soeryono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990. hlm 358

menyelurkan kegiatan jalanan tersebut kadangkala mereka terjebak dalam berbagai aksi kekerasan. Misalnya, ketika sedang mabuk-mabukan mereka kerap melakukan keonaran, atau mengadakan pungutan-pungutan liar di jalan.

Di berbagai pemberitaan media massa sering dijumpai kasus-kasus kekerasan yang diakibatkan oleh aksi premanisme, seperti “Pemuda mabuk tewas karena sering bikin onar. “Seorang preman tewas di kroyok karena sering memalak pedagang”, “Mahasiswi pingsan karena dikerjai segerombolan preman”.

Kejadian tersebut di atas sering dijumpai di berbagai pemberitaan media massa, dan bentuk-bentuk kekerasan yang diakibatkan oleh ulah preman ini menunjukkan gejala yang mebingkat dan sudah sangat membahayakan masyarakat. Keadaan yang demikian, hendaknya menjadi perhatian yang serius bagi para pembuat Kebijakan ataupun para penegak hukum di dalam menanggulangi kekerasan yang di akibatkan oleh aksi premanisme.

Sebaliknya, aksi premanisme mendorong orang yang sebenarnya tidak bersangkut dengan tindakan kriminalitas melakukan tindakan pidana, seperti yang dilakukan oleh Jusri Simarmata bin Kaden Simamarta. Pada awalnya Jusri Simarmata bin Kaden Simamarta hanya kesal karena sering dimintai uang oleh seseorang yang di kenal di pasar tersebut sebagai preman. Orang tersebut bernama Pendi Lumban Toruan merasa dendam terhadap korban tiap kali bertemu dengan korban selalu di mintai uang, tetapi ketika Jusri Simarmata bin Kaden Simamarta meminta uang kepada Pendi Lumban Toruan selalu tidak di kasih atau tidak punya uang, untuk membalaskan rasa sakit hatinya, maka Jusri Simarmata bin Kaden Simamarta merencanakan pembunuhan terhadap korban Pendi Lumban Toruan.

Kendati apa yang dilakukan oleh Jusri Simarmata bin Kaden Simamarta sebagai akibat dari aksi yang dilakukan ulah Pendi Lumban Toruan. Tetapi, perbuatan Jusri

Simarmata bin Kaden Simamarta dengan melakukan pembunuhan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Pertanggungjawaban pidana dapat terjadi apabila adanya kesalahan, adanya kesalahan dapat disebabkan oleh kesengajaan, kelalaian dan tiadanya alasan pemaaf.

Dalam delik tertentu pertanggungjawaban pidana dapat terjadi lebih dahulu sebelum adanya perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan merupakan realisasi diri bagian pertanggungjawaban pidana.³

Berkaitan dengan di atas, untuk menentukan tindak pidana harus ada perbuatan manusia yang mendahuluinya dan memenuhi rumusan undang-undang. Kalau misalnya, ada perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan kemudian perbuatan itu tidak ada dalam rumusan undang-undang maka tindak pidana tidak dapat dikenakan atau gugur dengan sendirinya.

Untuk mendukung adanya perbuatan pidana atau tidak harus ada pembuktian dari perbuatan itu sendiri. Menurut van Bummelen, pembuktian adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang ; a) apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi, b) apa sebabnya demikian halnya.⁴

Sejalan dengan hal tersebut, Martiman Prodjohamidjojo, mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁵

Intisari dari Hukum Acara Pidana (KUHP) terletak pada acara pembuktian, untuk itu diperlukan sistem pembuktian yang terpadu dalam menjelaskan bagaimana perbuatan pidana itu terjadi. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara

³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana* (Aksara Baru, Jakarta, 1963, hlm.75

⁴ Dalam Sasangka & Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.11

⁵ *Ibid*, hlm.11

bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.⁶

Sedangkan tujuan dan guna pembuktian adalah, bagi penuntut umum, pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.

Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.

Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusannya.

Dengan demikian pembuktian penting untuk mengetahui adanya perbuatan pidana dan memberi keyakinan terhadap hakim untuk memberi putusan hukum bagi suatu perbuatan pidana.

Di samping adanya pembuktian, suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur atau elemen sebagai berikut :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur-unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif .⁷

⁶ *Ibid*

Adanya unsur atau elemen seperti di atas, suatu delik dapat dirumuskan, seperti pada kasus Jusri Simarmata bin Kaden Simamarta yang di jatuhi vonis hukuman selama 10 (sepuluh) tahun karena melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan sebagaimana di atur dalam Pasal 340 KUHP.

Masalahnya bagaimana pembuktian bahwa terdakwa Jusri Simarmata bin Kaden Simamarta melakukan tindak pembunuhan dengan perencanaan. Pasal 340 KUHP tersebut memuat tiga unsur, yaitu “barang siapa”, dengan sengaja”, “dengan rencana lebih dahulu” dan menghilangkan nyawa orang jiwa orang lain”. Pernyataan “dengan rencana lebih dahulu” memberikan pengertian bahwa sebelum perbuatan tersebut dilakukan, seseorang telah lebih dahulu membuat rencana. Misalnya mengadakan persiapan, memilih waktu yang tepat dan memandang rendah nyawa orang lain.⁸

Berbeda dengan pembunuhan biasa, seperti dalam ketentuan Pasal 359 KUHP, kematian orang sebagai akibat karena kurang kehatian-hatian atau lalainya terdakwa. Misalnya, seorang pengendara motor karena kelaliannya menyebabkan orang mati, karena ketabrak. Atau sebab yang lain, misalnya, karena perkelahian sehingga menyebabkan salah satu mebinggal dunia.

Pasal 340 KUHP tersebut memuat tiga unsur, yaitu “barang siapa”, dengan sengaja”, “dengan rencana lebih dahulu”, dan “menghilangkan nyawa orang lain”. Unsur “dengan rencana lebih dahulu” dalam Pasal 340 KUHP itu mendahului pelaksanaan perbuatan pidana. Maksudnya dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebelum melakukan perbuatan pembunuhan, seorang telah lebih dahulu membuat rencan. Misalnya, dengan mengadakan persiapan, memilih waktu yang tepat dan memandang rendah nyawa orang lain.⁹

⁷ *Ibid*, hlm.63

⁸ D. Schaffmeister, N Kejzer dan Ph Sitorus, *Hukum Pidana*, Liberty Yogyakarta, 1995, hlm.99

⁹ *Ibid*, hlm.11

Selanjutnya syarat utama dari adanya “rencana” menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) adalah “saat untuk menimbang dengan tenang dan berpikir secara mantap.”¹⁰ Untuk membuktikan ada tidaknya unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dari syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dalam praktek, tidak serta merta menjadi mudah untuk membuktikannya.

Hal tersebut dapat dipahami karena dalam konteks histories unsur dengan rencan terlebih dahulu” sebenarnya sesuatu yang asing bagi pengertian hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, para hakim di Indonesia kemudian berpaling kepada penjelasannya mengenai unsur “dengan rencana terlebih dahulu” yang dikembangkan oleh sarjana hukum dan yurisprudensi di Belanda.

Untuk diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang di mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat mempertimbangkan dan akibat perbuatannya, dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.¹¹

Penghapusan pidana dapat dijelaskan dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP ” Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.Selain penghapusan pidana tersebut di atas, terdakwa memiliki tingkat kecerdasan Borderline atau Bodoh berdasarkan pemeriksaan Psikiatrik dan Psikolog dr. Teddy Wijaya Sp.Kj.

Berdasarkan pada kasus di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana sistem pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang terdapat pada Pasal 340 KUHP,

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.208

sehingga penyusunan tugas akhir ini diberi judul: STUDI KASUS PERKARA
NOMOR : 275 / PID.B / 2011 / PN. BDG TENTANG TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN TERDAKWA MEMILIKI IQ RENDAH.